



**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN
DAERAH**

Afian Dezi Sanda Sipi¹ dan Asrin Tandi²

Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia^{1 dan 2}
afiandez@ukipaulus.ac.id¹ dan asrintandi@ukipaulus.ac.id²

Abstrak

Latar belakang: Zaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik.

Tujuan penelitian: Untuk mengkaji dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dan untuk mengkaji dan menjelaskan pengaruh aksesibilitas keuangan daerah terhadap upaya penggunaan informasi keuangan daerah.

Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 75 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian: Variabel penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar dan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) di lingkungan pemerintahan Kota Makassar.

Kesimpulan: Variabel Penyajian laporan keuangan (X1) Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan Makassar (Y). Variabel Penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah.

Kata kunci: **Penggunaan Informasi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

Abstract

Background: The current reform era in Indonesia requires that the government be able to manage regional autonomy and regional financial management system for the better.

Research purposes: To review and explain the influence of the presentation of regional financial statements on the use of regional financial information and to review and explain the influence of regional financial accessibility on efforts to use regional financial information

Research methods: This research is a survey study. Sampling technique uses purposive sampling with a sample number of 75 people. Data collection techniques use questionnaires that have been tested for validity and reliability. The data analysis technique used is multiple regression.

Research results: Variable Presentation of financial statements (X1) has a positive and significant effect on the Use of Regional Financial Information in the makassar city government environment and the accessibility variable of regional financial statements (X2) has a positive and significant effect on the use of regional financial information (Y) in the makassar city government environment.

Conclusion: Variable Presentation of financial statements (X1) Accessibility of regional Financial Statements (X2) simultaneously affects the variables of The Use of Financial Information Makassar Environmental Region (Y). Variable Presentation of financial statements (X1) has a positive and significant effect on the Use of Financial Information in the makassar city government environment. These findings indicate that the presentation of financial statements and the accessibility of financial statements have an important role in increasing the use of regional financial information.

Keywords: Use of Regional Financial Information, Presentation of Financial Statements, Accessibility of Regional Financial Statements

Diterima: 29-10-2021; Direvisi: 2-11-2021; Disetujui: 14-11-2021

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak (Hsb, 2019) , wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan (Ristanti & Handoyo, 2017) dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zainudin, 2016). Pemberian otonomi daerah dapat diharapkan meningkatkan efisiensi,efektivitas,transparansi (Aditya & Surjono, 2017) dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia (Pratolo, 2001). Dan menurut (Prayoga & Yuhertiana, 2021) menyatakan bahwa adanya perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia pada saat ini menimbulkan beberapa tuntutan mengenai penggunaan informasi keuangan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik (Mustofa, 2012) serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada public (Malik, 2018) yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik seperti memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi keuangan pemerintah daerah berupa laporan keuangan (Fauziyah & Handayani, 2017).

Dengan pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah (Rondonuwu et al., 2016). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola desentralisasi secara transparan, ekonomi, efesien dan akuntabel (Suoth et al., 2016). Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi (Nurhayani, 2013) dan aspek pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama, agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintahan daerah (Defitri, 2018).

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting yang menyangkut kegiatan pemerintah harus terekam dengan baik dalam suatu ukuranukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan.

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dari beberapa peneliti sebelumnya. Adapun penelitian tersebut yaitu : dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2009) yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan (Hehanussa, 2015) dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (Waode, 2016). Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Bandariy (2012) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Adapun hasil yang dari penelitian tersebut yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Ramadhani,dkk.(2014) juga melakukan

penelitian untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah, dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dan untuk mengkaji dan menjelaskan pengaruh aksesibilitas keuangan daerah terhadap upaya penggunaan informasi keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar di SKPD tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan pertimbangan bahwa sangat relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal dan eksternal laporan keuangan daerah Kota Makassar, yang dalam hal ini yang menjadi populasi yang dituju oleh peneliti adalah OPD yang tepatnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Makassar dengan responden kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, dan pengawai yang di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) menggunakan teknik proporsionate stratified random sampling; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak seragam (heterogen) yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terkait) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan informasi keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, objek, atau kejadian. Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2= tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4= setuju, Skor 5 = sangat setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi karakteristik responden dan hasil jawaban dari setiap responden pada setiap pernyataan dalam kuisisioner atau alat ukur yang digunakan. Total kuisisioner yang ditujukan pada ODP kota Makassar berjumlah 100 eksampler sedangkan yang kembali dan dapat diolah hanya 75 eksampler. Adapun rinciannya adalah seperti pada tabel berikut

Distribusi Pengambilan Kuisioner

Aktivitas	Jumlah	Persentasi
Kuisioner Yang Disebarkan	100	100%
Kuisioner Yang Kembali	80	80%
Kuisioner Yang Tidak Dapat Diolah	5	5%
Kuisioner Yang Dapat Diolah	75	75%

Gambar 1. Distribusi Pengambilan Ekosioner.
Sumber: Olahan Data Deskriptif SPSS 25.

Perhitungan statistik deskriptif untuk variabel penyajian laporan keuangan (X1) menggunakan bantuan *IBM SPSS 25* yang hasilnya dapat dilihat pada gambar tabel berikut:

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X11	75	2	5	3.56	.889	.790
X12	75	2	5	3.59	.824	.678
X13	75	2	5	3.45	.920	.846
X14	75	2	5	3.56	.889	.790
X15	75	1	5	3.45	.859	.738
X1T	75	11	23	17.61	2.471	6.105
Valid N (listwise)	75					

Sumber: Olahan data deskriptif variable laporan keuangan dengan bantuan *IBM SPSS 25*

Gambar 2. Deskriptif Laporan Keuangan (X1).
Sumber: Olahan Data Deskriptif SPSS 25.

Perhitungan statistik deskriptif untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) menggunakan bantuan *IBM SPSS 25* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X21	75	2	5	3.45	.741	.548
X22	75	2	5	3.41	.931	.867
X23	75	1	5	3.43	.932	.870
X24	75	1	5	3.47	1.018	1.036
X25	75	2	5	3.37	.802	.643
X2T	75	11	22	17.13	2.500	6.252
Valid N (listwise)	75					

Sumber: Olahan data deskriptif variable Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) dengan bantuan *IBM SPSS 25*

:Gambar 3. Deskriptif Laporan Keuangan Daerah (X2).
Sumber: Olahan Data Deskriptif SPSS 25.

Perhitungan statistik deskriptif untuk variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) menggunakan bantuan *IBM SPSS 25* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Descriptive Statistics Variable Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y1	75	1	5	3.99	.979	.959
Y2	75	1	5	4.00	.915	.838
Y3	75	1	5	3.57	1.093	1.194
Y4	75	2	5	3.81	.911	.830
Y5	75	1	5	3.40	1.000	1.000
YT	75	7	24	18.77	3.604	12.988
Valid N (listwise)	75					

Sumber: Olahan data deskriptif variable Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) dengan bantuan IBM SPSS 25

Gambar 4. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y).
Sumber: Olahan Data Deskriptif SPSS 25.

Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.315	3.356		.690	.493
	penyajian laporan keuangan	0.433	.151	.297	2.871	.005
	Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah	0.515	.149	.357	3.455	.001

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Gambar 5. Distribusi Pengambilan Ekosioner.
Sumber: Olahan Data Deskriptif SPSS 25.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 2.315 + 0.433X_1 + 0.515X_2 + e$

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,87 lebih besar dibanding nilai t tabel 1,984 (df = 73; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,005 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang diberikan pemerintah kepada publik. Sehingga publik bisa menggunakan informasi keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik Mardiasmo (2014: 30). Oleh karena itu pihak pemerintah harus senantiasa memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dan teori sinyal. Dalam teori keagenan dibahas tentang masalah keseimbangan informasi atau dikenal dengan assimetri information. Dalam hal ini keterkaitan antara keseimbangan informasi dapat dilihat pada pihak penyaji dan pihak pengguna dimana kedua pihak ini harus memiliki keseimbangan informasi. Pihak penyaji harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak pengguna tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan dalam teori sinyal juga dibahas tentang pemberian

sinyal berupa informasi-informasi yang berasal dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

Hasil pengujian hipotesis pertama yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa ketika entitas pemerintah menyajikan laporan keuangan dengan baik maka hal tersebut dapat dinikmati atau dipergunakan oleh para pengguna informasi keuangan. Ketika informasi keuangan pemerintah telah dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut bisa dinilai transparansi dan akuntabilitasnya oleh para pengguna laporan keuangan. Berarti laporan keuangan pemerintah telah mampu dipertanggungjawabkan kepada para pengguna laporan keuangan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,87 lebih besar dibanding nilai t tabel 1,984 (df = 73; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,005 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Penyajian laporan keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Penggunaan informasi keuangan yang baik tergantung kepada bagaimana akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami oleh para pengguna laporan tersebut. Dalam hal ini akses yang biasa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan salah satunya website. Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang diungkapkan oleh Tjandrakirana dan Meva (2014) yang menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi mengenai perusahaan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah bahwa ada korelasi serta distribusi yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan semakin tinggi pula penggunaan informasi keuangan daerah, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis kedua diterima. Ini berarti makin baik aksesibilitas laporan keuangan, makin baik penggunaan informasi keuangan daerah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. Dalam hipotesis kedua ini, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah maka dapat dikatakan bahwa semakin baik akses yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak pengguna informasi keuangan maka akan semakin baik pula informasi tersebut dapat digunakan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah memberikan akses kepada

publik maka pemerintah memiliki tanggung jawab kepada publik untuk memberikan kemudahan dalam hal pengaksesan laporan keuangan melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Dari hasil uji signifikansi F menunjukkan bahwa nilai f sebesar 12,289 lebih besar dibanding nilai f table 3,090 ($df = 73$; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,00 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Penyajian laporan keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) di lingkungan pemerintahan Kota Makassar.

KESIMPULAN

Variabel Penyajian laporan keuangan (X1) Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan Makassar (Y). Variabel Penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah.

BIBLIOGRAFI

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Sikap*, 2(1), 49–62.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 2(1), 82–90.
- Hsb, A. M. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Malik, R. A. (2018). *Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam permohonan informasi publik: studi kasus pada sengketa informasi pemberian informasi dokumen izin mendirikan bangunan*. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Nurhayani, H. (2013). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (survey pada seluruh dinas pemerintahan kota bandung). *Universitas Komputer Indonesia*.
- Pratolo, S. (2001). Double Entry Book Keeping dan Accrual Basis Sebagai Pendukung Akuntabilitas Sektor Publik. *Journal of Accounting and Investment*, 2(2), 105–114.
- Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi

- Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(2), 68–79.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115–122.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Suoth, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Waode, A. M. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kota Baubau)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 338–351.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License